

## ANALISIS RESEPSI AKTIVIS ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS DI SURABAYA TERHADAP ISU KOMUNISME DALAM FILM SENYAP

**Nadia Annastasia Ningrum**

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,  
Universitas Negeri Surabaya

[nadianingrum16041184050@mh.unesa.ac.id](mailto:nadianingrum16041184050@mh.unesa.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerimaan dan interpretasi dari anggota organisasi mahasiswa ekstra kampus di Surabaya sebagai aktivis terhadap isu komunisme dalam peristiwa pasca G30S 1965 pada film Senyap. Sampai saat ini, isu ini masih dianggap hal yang tabu dan sentimental untuk dibahas di Indonesia. Banyak organisasi maupun yayasan yang telah mengadakan rekonsiliasi terhadap korban peristiwa ini. Sayangnya hal ini tidak diterima dengan baik oleh pemerintah sehingga sering terjadi pembubaran paksa pada acara diskusi terkait isu ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis resepsi yang menghasilkan data berupa kategori informan dalam menerima dan menginterpretasi pesan yang terbagi menjadi dua posisi. Adapun sebagai berikut; 1) Posisi hegemoni-dominan, ada dua informan yang menerima seluruh pesan dalam film senyap, 2) Posisi negosiasi, sebanyak lima informan yang menerima pesan, namun juga menolak beberapa poin pesan yang disampaikan film senyap. Adapun perbedaan penerimaan pesan oleh informan dari organisasi yang berbasis agama Islam, Kristen, Katolik dan Nasionalis.

**Kata Kunci:** komunisme, pasca G30S 1965, analisis resepsi, film senyap

### Abstract

This study examines about reception and interpretation from the member of extra-campus student organization in Surabaya as an activist against communism issues in post-G30S 1965 incidents on Senyap movies. This issue considered, and still consider as a taboo and sentimental thing to discusses in Indonesia until today. Many organizations or foundations had reconciled the victims of this incident. Unfortunately, it is not well accepted by the government so there are frequent forced dissolution occurs at closed-door discussion on this issue. The methodology of this study is reception analysis which generate data form of informants categories in receiving and interpreting the message which divided into two positions. As follows; 1) Hegemony-dominant, there are two informants who accepted all the message in Senyap movie, 2) Negotiation, there are five informants who accepted, but also refused some point of the message that delivered by Senyap movie. The differences of the messages reception by the informants are coming from Islamic, Christian, Catholic, and Nationalist-based organization.

**Keywords:** communism, post-G30S 1965, reception analysis, senyap movie

### PENDAHULUAN

Komunisme merupakan salah satu paham politik atau ideologi yang sempat berkembang di Indonesia. Seiring dengan perjalanannya, komunisme mengalami sejumlah konstruksi dan restriksi yang tersebar begitu saja. Hal ini dipengaruhi oleh hegemoni yang ada pada masa rezim Orde Baru presiden Suharto, pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Menilik kembali peristiwa politik pada tahun 1965, dimana Indonesia pada masa pemerintahan presiden Suharto telah melakukan pelanggaran HAM secara besar-besaran yang berkaitan dengan paham komunisme di Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu bentuk hasil hegemoni yang dilakukan oleh kelompok elit Suharto terhadap beberapa kelompok masyarakat maupun politik. Akibatnya, muncul stereotip terhadap penganut paham komunis di Indonesia, dimana mereka dianggap sebagai kelompok tidak bertuhan.

Arti ideologi ini berbeda dengan yang dipahami masyarakat Indonesia pasca peristiwa G30S 1965. Isu ini diterima begitu saja oleh masyarakat Indonesia, dengan berbagai alasan yang mengikuti terutama karena berhubungan dengan keagamaan. Menyebabkan tokoh-tokoh masyarakat maupun keagamaan termakan isu tersebut, yang mana membuat mereka secara sukarela ikut serta dalam aksi pembantaian pada tahun 1965/1966 pasca G30S.

Ada lima hal yang menjadi acuan pemerintahan rezim Orde Baru untuk memberantas PKI hingga ke akar-akarnya, pasca G30S, yang ditanamkan terus menerus kepada masyarakat pada masa Orba. Pertama, hanya ada satu versi sejarah yang dikenalkan kepada rakyat dan terus didaur ulang bahwa PKI dalang dibalik peristiwa G30S. Kedua, orang baik (diakui) adalah orang yang mendapatkan surat keterangan bebas G30S.

Ketiga, diberikan tanda ET (Eks-Tahanan Politik) pada kartu identitas orang-orang yang terlibat G30S, sebagai bentuk diberlakukannya politik diskriminasi. Keempat, diberlakukan surat keterangan “bersih diri” dan “bersih lingkungan” melalui mekanisme penelitian khusus. Serta yang kelima memberlakukan Tap MPRS/XXV 1996, yang melarang ajaran komunisme, marxisme dan leninisme (Teguh, 2018).

PKI termasuk menjadi partai yang kuat pada masa pemilu pertama pada tahun 1955, berkat pergerakan organisasi pemudanya yaitu Pemuda Rakyat (PR). Pada masa pemilu ini PKI harus bersaing dengan NU dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). IPKI didirikan oleh AH Nasution, Perwira Tentara Indonesia (yang telah dicopot posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat tahun 192) pada tahun 1954.

Capaiannya IPKI pada pemilu 1955 masih kalah jauh dengan NU dan PKI (Matanasi, 2019). Pada tahun 1959, AH Nasution mendirikan organisasi masyarakat pemuda IPKI bernama Pemuda Pancasila (PP). PP bahkan menebarkan propaganda anti-komunis dengan menebalkan fobia akan bangkitnya gerakan kiri yang merupakan ancaman bagi Indonesia, karena dapat menggantikan ideologi Pancasila (Hasan, 2019). Akibat dari propaganda ini, lebih dari 500 ribu jiwa melayang dalam rentang waktu Oktober 1965 hingga Maret 1966, yang mana tidak ada yang tahu mereka bersalah atau tidak.

Berdasarkan dokumen rahasia milik Amerika Serikat yang dipublikasikan oleh lembaga non-profit *National Security Archive* (NSA), lembaga *National Declassification Center* (NDC), dan lembaga negara *National Archives and Records Administration* (NARA) disebutkan upaya Tentara Angkatan Darat untuk menyingkirkan Sukarno dan paham komunis di Indonesia (Simpson, 2017). Sebanyak 39 dokumen dengan total 30.000 halaman yang berbentuk catatan harian dari tahun 1964-1968 itu menyebutkan, diantaranya tentang upaya AD untuk menyingkirkan Sukarno dan menghancurkan gerakan kiri di Indonesia, eksekusi terhadap PKI, serta keterlibatan pejabat Amerika dalam mendukung upaya AD itu (Muzayyin, 2017).

Pada masa kepemimpinan Suharto, Indonesia menjadi negara demokrasi terpimpin dimana pada masa ini banyak keterbatasan dalam mencapai kebebasan berpendapat. PKI yang dianggap membawa pengaruh buruk terhadap Indonesia, berusaha dibinasakan oleh Suharto. Dengan berakhirnya Orba, ini juga menunjukkan bagaimana *counter* hegemoni bekerja di masyarakat dalam merespon pola pemerintahan pada masa itu. Hingga pada masa reformasi, pemerintah masih menjadikan isu komunisme adalah hal yang tabu. Namun berbeda dengan dahulu, masyarakat kini sudah memiliki sumber informasi yang melimpah dan lebih aktif mencari referensi

Ada banyak cara yang dilakukan dalam upaya rekonsiliasi tragedi 1965. Seperti aksi karnasi di Istana Merdeka oleh Aktivis Jaringan Solidaritas Korban dalam menagih janji Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran masa lalu (Ganesia, 2018). Adapula komika Pandji Pragiwaksono yang menggelar tur dunia bertepatan HAM dan bekerjasama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan

Korban Tindak Kekerasan (Kontras) (Firdaus, 2016). Kemudian Symposium Nasional dengan tema “Membedah Tragedi 1965, pendekatan Kesejarahan” yang bertujuan untuk mengungkap fakta dibalik tragedi tersebut (McCawley, 2014). Adapun upaya lainnya untuk merekonsiliasi yakni melalui film.

Film merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang diinginkan oleh pembuat film. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2009 tentang Perfilman, pasal 1 menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film sendiri memiliki beberapa fungsi secara umum, yakni sebagai alat hiburan, sumber informasi, alat pendidikan dan pencerminan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Menurut presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy, film merupakan media ekspresi terbaik yang pernah ada di dunia, karena film mampu memberikan kehidupan dan bentuk pada semua ide, bentuk praktik dan emosi, dan satu-satunya hal yang membatasinya adalah kecerdasan manusia. Hal ini menjadi penanda bahwa film sebagai media kritik dan wacana Amerika Serikat (Sanders & Norris, 2003).

Perkembangan ilmu dan seni pertunjukan di Indonesia tidak pernah lepas dari kondisi ekonomi dan politik yang ada. Film sebagai tontonan yang baru, membawa hubungan antara fiksi dan realitas dimana mempengaruhi cara pandang atas nilai-nilai budaya lokal maupun global. Hal ini berpengaruh pada kebijakan politik terhadap tontonan, khususnya pada film, yang melahirkan peraturan film di Hindia Belanda (Garin & Dyna, 2015). Tumbuh dan berkembangnya film sangat bergantung pada teknologi dan paduan unsur seni sehingga menghasilkan film yang berkualitas (McQuail, 1997:110).

Fungsi perfilman sendiri diatur dalam UU No. 33 tahun 2009 pada bab 2 pasal 4 yaitu Budaya; Pendidikan; Hiburan; Informasi; Pendorong karya kreatif; dan Ekonomi. Film juga dikelompokkan menjadi film dokumenter (*documentary films*), film cerita pendek (*short films*), dan film cerita panjang (*feature-length films*) (Effendy, 2009:3).

Pada umumnya film dokumenter dibuat untuk mengungkap suatu kebenaran dibalik sebuah kejadian, dapat juga menjadi sarana mengkritik suatu pihak. Joshua Oppenheimer, seorang sutradara asal Amerika Serikat ini membuat film dokumenter yang menceritakan peristiwa pasca G30S tahun 1965. Ia membuat dua film dokumenter dalam memproyeksikan kejadian pasca G30S tahun 1965. Pada tahun 2012 ia merilis film *Jagal* yang fokus pada pelaku pembantaian. Dua tahun kemudian ia merilis film *Senyap* yang fokus pada keluarga korban pembantaian.

Penelitian ini akan fokus pada film *Senyap*, yang bercerita dengan sudut pandang keluarga korban pembantaian terkait peristiwa tersebut dan dampaknya terhadap keluarga korban. Dalam aksi pembantaian ini tidak lepas dari tangan organisasi-organisasi besar, baik berbasis agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga pelajar Katolik, maupun nasionalis seperti AD. Beberapa dari organisasi ini juga melahirkan atau

memiliki organisasi *underbouw* yang kini menjadi organisasi mahasiswa ekstra kampus. Seperti Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang dikenal memiliki Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang merupakan organisasi mahasiswa yang didirikan oleh NU.

Selain organisasi pemuda yang berbasis agama Islam, adapula Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari *Katholike Studenten Verenging* dan perserikatan Mahasiswa Katholik Indonesia (PMKRI Yogyakarta). Berfungsi sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan mahasiswa Katholik dengan azas Pancasila, berjiwa Katholik, dan semangat mahasiswa. Kemudian Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang merupakan hasil dari konferensi *Christelijke Studenten Vereeniging op java* dan mahasiswa Surabaya yang tergabung dalam Jong Indie (Admin, 2018).

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia lahir dari hasil fusi tiga organisasi mahasiswa yang berazaskan Marhaenisme ajaran Soekarno yakni, Gerakan Mahasiswa Marhaenis (Yogyakarta), Gerakan Mahasiswa Merdeka (Surabaya), dan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (Jakarta) (laman DPP GMNI). Adanya banyak literasi terkait peristiwa pasca G30S tahun 1965, membuat masyarakat lebih paham akan ideologi komunisme dan lebih bijak dalam bersikap.

Mahasiswa anggota organisasi ekstra kampus dipilih sebagai subjek penelitian ini karena keterkaitan beberapa ormek dengan organisasi pemukanya yang berkaitan dengan peristiwa pasca G30S tahun 1965. Selain itu mereka juga mencerminkan mahasiswa yang peka terhadap isu-isu disekitarnya, serta melihat bagaimana mereka menerima dan menginterpretasikan isu komunisme dari film senyap atau dapat disebut sebagai analisis resepsi.

Analisis resepsi merupakan studi khalayak dari komunikasi massa yang fokus pada pemaknaan audiens terhadap pesan media. *Reception Research* dalam studi media adalah terkait dengan kajian budaya dari Birmingham Centre, meskipun kemudian menunjukkan bahwa teori resepsi memiliki akar lainnya (Alaasutari, 1999:2). Kegiatan penerimaan pesan diawali dengan proses *decoding* yang merupakan kegiatan yang berlawanan dengan proses *encoding*. *Decoding* adalah kegiatan untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima (Morissan, 2013:21).

Menurut Stuart Hall, khalayak melakukan *decoding* terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan posisi, yaitu:

1. Posisi Hegemoni Dominan  
Situasi dimana khalayak memahami pesan yang disampaikan oleh media secara apa adanya. Dengan kata lain, baik media dan khalayak sama-sama menggunakan kode dominan yang berusaha dibangun oleh media. Dapat dikatakan media menggunakan kode dominan yang berlaku di masyarakat.
2. Posisi Negosiasi

Posisi dimana khalayak secara umum menerima kode dominan, namun menolak penerapannya dalam kasus-kasus tertentu. Sebagaimana dikemukakan Stuart Hall: *the audience assimilates the leading ideology in general but opposes its application in specific case*. Dapat dikatakan khalayak tidak mentah-mentah menerima pesan yang disampaikan media.

### 3. Posisi Oposisi

Terjadi ketika khalayak yang kritis mengganti atau mengubah pesan atau kode yang disampaikan media dengan pesan atau kode alternatif. Audiens menolak makna pesan yang dimaksudkan media dan menggantikannya dengan cara berpikir mereka sendiri atau yang dianggap lebih relevan terhadap topik yang disampaikan media.

Stuart Hall menerima fakta bahwa media membingkai pesan dengan maksud tersembunyi, yaitu untuk membujuk. Akan tetapi demikian khalayak juga memiliki kemampuan untuk menghindari diri dari kemungkinan tertelan oleh ideologi dominan. Seringkali pesan bujukan yang diterima khalayak bersifat sangat halus. Para ahli teori studi kultural tidak berpandangan khalayak mudah dibodohi media, namun seringkali khalayak tidak tahu mereka telah terpengaruh dan menjadi bagian dari ideologi dominan (Morissan, 2013:550-551).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis resepsi. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengeksplorasi, menemukan, menjelaskan dan menerangkan fenomena atau objek sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur dan tidak dapat dijumlahkan secara numerik atau angka-angka (Afiyanti & Rachmawati, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti bertujuan untuk menarasikan respon khalayak berdasarkan persepsi subjek penelitian terhadap objek yang diangkat secara mendalam. Analisis resepsi menekankan pada penggunaan media sebagai refleksi dari konteks sosial budaya sebagai proses dari pemberian makna melalui persepsi khalayak atas pengalaman dan produksi kultural (McQuail, 1997:19).

Surabaya menjadi salah satu kota yang dijadikan tempat belajar salah satu tokoh besar komunis Indonesia, yakni Musso. Seperti yang kita ketahui pula bahwa rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto berada di kota Surabaya, yang mana ia adalah seorang wakil ketua Sarekat Islam cabang Surabaya. Dalam buku HOS Tjokroaminoto, *Hidup dan Perjuanganmu*, terbitan Partai Sarekat Islam, yang dikutip McVey, menyebutkan rumah Tjokroaminoto menjadi tempat penting bertemunya secara pribadi pemimpin pergerakan (Musso;9). Serta Surabaya sendiri tidak lepas dari keterkaitannya dengan kelahiran



organisasi-organisasi mahasiswanya yang besar di Indonesia.

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa anggota organisasi mahasiswa ekstra kampus di beberapa universitas di Surabaya. Sedangkan objek penelitian ini adalah resepsi mahasiswa anggota ormek di Surabaya terhadap isu komunisme dalam film Senyap. Sumber data penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan kriteria yang telah dibuat, yaitu yang merupakan anggota ormek cabang Surabaya dan sudah menonton film senyap.

Tabel 1. Informan

| No. | Nama | Organisasi |
|-----|------|------------|
| 1.  | F    | PMKRI      |
| 2.  | R    | GMNI       |
| 3.  | M    | KAMMI      |
| 4.  | I    | PMII       |
| 5.  | A    | HMI        |
| 6.  | S    | GMKI       |
| 7.  | D    | IMM        |

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan tahap pengumpulan dan reduksi data kemudian menyajikan dan menarik kesimpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan informan terbagi menjadi dua kategori yang berbeda. Dalam setiap kategorinya memiliki kesamaan dalam memaknai komunis yang disuguhkan dalam film senyap, dimana PKI adalah korban politik dari pemerintah Orba. Tidak semua adegan disetujui oleh sebagian besar informan, dikarenakan mereka memiliki pendapat sendiri terkait adegan tersebut.

### A. Mahasiswa dengan Kode Dominan dalam Film Senyap

Dari tujuh informan, dua diantaranya berada pada posisi hegemoni dominan. Mereka menyetujui isu komunisme yang disampaikan film Senyap, bahwa adanya orang-orang tidak bersalah yang menjadi korban dalam pembantaian pasca G30S tahun 1965. Dalam film ini juga terlihat bahwa aktor-aktor yang diwawancarai tidak paham apa PKI itu, bahkan tidak tahu apa kesalahan PKI yang menyebabkan mereka dibunuh. Dapat dikatakan dalam film ini mengatakan bahwa PKI tidak bersalah dalam artian kasus peristiwa Gerakan 30 September, karena yang menjadi dasar dari aksi pembantaian ini adalah kasus tersebut.

Informan F, anggota PMKRI cabang Surabaya menyetujui adegan bagian Mamak yang sedang memotong buah dan bercerita bagaimana para penjagal yang telah membunuh banyak orang termasuk anaknya sendiri. Disini mamak berkata bahwa mereka para penjagal dapat hidup enak karena hasil merampok orang-orang PKI. Bagaimana mereka yang menangkap dan membunuh orang-orang PKI

bersikap buruk, bahkan hingga mempermainkan istri orang-orang yang tertuduh PKI ini.

Anak pertama Mamak yaitu Ramli menjadi salah satu korban pembantaian terhadap PKI oleh para anti komunis. Ramli yang begitu tersiksa ketika mencoba kabur dari peristiwa pembunuhan itu. Mamak juga bercerita, Ramli terlihat begitu kurus hingga tampak seperti tulang berbalut kulit karena disiksa. Menerima banyak tekanan dari beberapa sudut dengan alasan karena ia adalah orang PKI.

Kemudian informan F juga menyetujui pada bagian yang menunjukkan cuplikan pimpinan pasukan pembunuh tingkat desa di Sumatra Utara, Amir Hasan dan Inong yang sedang menjelaskan kronologi bagaimana dahulu mereka memperlakukan tahanan komunis. Menyeret satu persatu korban hingga ke hilir sungai Singular yang kurang lebih berjarak seratus meter. Bahkan sebelum diturunkan dari truk, para korban dipukuli terlebih dahulu dengan tujuan agar tidak mampu kabur saat turun.

Beberapa adegan itu, menggambarkan bagaimana orang-orang yang tergabung satuan komando aksi maupun satuan-satuan lainnya yang menentang komunisme mengintimidasi dan mendiskriminasi orang-orang yang mereka yakini komunis. Informan F yang merupakan anggota PMKRI cabang Surabaya yang juga aktivis di kota asalnya Maluku, ini memiliki pengalaman serupa dengan Ramli dalam film senyap. Ia bersama teman-temannya di Maluku sering menyampaikan kritik kepada pemerintah daerah Maluku, karena tindakannya ini membuatnya beberapa kali mendapatkan peringatan hingga ancaman. Peringatan yang datangpun tidak mempengaruhi pendirian informan, sehingga keluarganya menjadi sasaran. Ini bermaksud agar informan F untuk mengakhiri tindakan kritisnya.

*“Saya sudah berada pada posisi itu, ancaman dan sebagainya. Apalagi sebagai ketua PMKRI cabang Surabaya dan saya juga aktif mengkritik pemerintah daerah. Saya kan dari Maluku, kita akan berada dalam hal-hal seperti itu. Saya pikir itu tergantung komitmennya kita, kalau mau sudah berani untuk melangkah ya melangkah terus,” (wawancara 8 September 2020)*

Informan R yang merupakan anggota GMNI cabang Surabaya dan informan F sepakat dengan adegan saat salah seorang warga di Sumatra Utara didatangi Adi untuk diperiksa matanya guna membuat kacamata. Setelah itu, Adi juga bertanya-tanya mengenai PKI kepada warga tersebut. Dijelaskan bahwa ia bahkan tidak tahu apa salah PKI hingga harus disiksa dan dibunuh seperti itu.

Kedua informan juga sepakat dengan adegan dimana saat Adi dan anaknya sedang berbincang mengenai pelajaran sejarah yang diterimanya di sekolah. Ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara penjelasan dari pemerintah dengan yang diketahui oleh keluarga korban.

Seperti yang diketahui, tindakan pembantaian yang dilakukan pemerintah kepada PKI adalah atas dasar peristiwa G30S. Tidak dapat dipungkiri hubungan antara PKI dan TNI sejak awal kurang baik karena persaingan antar keduanya dalam pemilu pertama tahun 1955. Operasi G30S ini dipimpin Letkol Untung yang merupakan anggota Resimen Cakrabirawa pasukan pengawal presiden dan sempat menguasai Jakarta. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena TNI dapat merebut kembali yang kemudian menuding PKI dalang dibalik semua ini. Sjam Kamaruzaman dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa mengaku sebagai pemimpin Biro Khusus PKI, mengatakan G30S memang ia rancang dan melibatkan sejumlah prajurit TNI (BMW, 2021).

Faktor yang memperkuat atas ketidakjelasan dasar pembantaian ini yakni usaha Soeharto menggulingkan Soekarno. Hal tersebut didukung dengan tindakan penculikan Soekarno, yang mana merupakan pengagum paham komunisme. Inilah alasan yang digunakan Soeharto dan TNI untuk menggulingkan Soekarno. Didukung dengan menggiring opini bahwa PKI tidak ber-Tuhan.

*“Dia memang mengagumi Mahaenisme, karena Marxisme itu alirannya kiri tapi diserap oleh Soekarno hanya pada bagian yang hanya memang Komunis versi Marxis yang diolah Marhaenisme.”* (wawancara, 15 September 2020)

Meskipun komunisme memang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, namun mengagumi suatu ideologi bukanlah sebuah kesalahan. Dalam hal ini mengagumi bukan berarti akan menerapkannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Soekarno sendiri yang mencetuskan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara bangsa Indonesia.

Ideologi komunisme menjadi salah ketika para elit PKI berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Ideologi komunisme merupakan ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan ataupun hak para buruh. Arti kebebasan inilah yang disalah artikan menjadi tidak ber-Tuhan atau tidak beragama. hal itu terbantah dengan fakta bahwa Tan Malaka yang seorang pahlawan Indonesia dengan ideologi kiri ini taat dalam beragama.

Pada saat itu bahkan hingga kini di Indonesia, agama dianggap sebagai hal yang sangat penting. Meskipun beragama menjadi urusan pribadi tiap individu, seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) bahwa, *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”*.

Peran negara sendiri juga sudah disebutkan pada Pasal 29 ayat (2) yaitu, *‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama’* Meskipun sudah

disebutkan dalam UUD 1945 terkait peran negara dalam menjamin kemerdekaan tiap penduduk dalam memeluk agama, ternyata hal ini juga tidak menjamin kebebasan masyarakat sepenuhnya.

Memiliki pengalaman serupa dan masih belum adanya kejelasan mengenai kesalahan PKI yang menyebabkan terjadinya peristiwa 1965 ini menjadi alasan para informan menyetujui dan menerima seluruh isi pesan yang disampaikan dalam film Senyap. Menurut mereka tidak ada yang salah dengan ideologi komunis, dengan menutupi kejadian yang sebenarnya pada kala itu, hanya akan membuat masyarakat semakin penasaran dan menduga-duga. Mencari literasi lain juga merupakan hal yang baik. Para informan juga berharap tindakan pemerintah saat ini terkait dengan peristiwa 1965 agar tidak adanya kesalahpahaman diantara masyarakat.

Seperti yang dikatakan Stuart Hall, bahwa posisi hegemoni-dominan adalah situasi saat media memproduksi dan mendistribusikan pesan kepada khalayak, kemudian khalayak menerima dan menyetujui isi pesan yang disampaikan (Morissan, 2013:50-551). Melihat dari bagaimana para informan menerima dan memiliki pandangan yang sama terhadap segala isi pesan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua informan memang terhegemoni dengan pesan film yang disampaikan oleh Joshua Oppenheimer selaku sutradara film Senyap.

## **B. Mahasiswa dengan Pertimbangan dalam Memaknai Film Senyap**

Dalam film senyap, komunisme digambarkan sebagai ideologi yang menjadi korban kambing hitam atas peristiwa G30S 1965. Pada kenyataannya film ini dianggap memiliki tujuan lain. Seperti yang dikatakan Stuart Hall, bahwa penyampaian pesan tidak bisa menjadi jaminan kalau penerima pesan akan menerima pesan dengan baik. Terdapat lima dari tujuh informan yang memiliki pendapatnya sendiri terhadap beberapa pesan yang disampaikan film senyap.

Beberapa hal yang membuat lima informan berada pada posisi negosiasi karena, yang pertama mengenai kebenaran dari pesan yang disampaikan di film senyap. Pertama mengenai kebenaran dari pesan yang disampaikan film senyap. Kelima informan ini sebenarnya menyetujui pesan yang ada, akan tetapi karena mereka bukanlah pelaku sejarah membuat mereka tidak seratus persen percaya dengan pesan yang disampaikan.

Informan A anggota HMI cabang Surabaya menyetujui adegan ketika Adi dan anak laki-laknya sedang berbincang mengenai sejarah PKI yang dijelaskan di sekolah. Disini anak laki-laknya bercerita bagaimana gurunya menjelaskan mengenai PKI yang melakukan penculikan terhadap jenderal-jenderal TNI. Adi menyanggah hal itu dengan mengatakan bahwa PKI tidak pernah melakukan hal demikian, pernyataan ini yang tidak diyakini oleh informan A.

*"Atinya dari percakapan, dari dokumenter yang kemudian dimunculkan untuk menadi sebuah film. Pernyataan-pernyataan dilontarkan oleh narasi film itu, lalu narasumber yang didatangi diberikan pernyataan itu, ya memang kita juga bisa mengasumsikan bahwa tidak semua film dokumenter itu adalah murni." (wawancara 24 September 2020)*

Apa yang berusaha disampaikan dari film senyap tidak ada yang tahu seratus persen benar maupun salah. Film dokumenter selalu memiliki tujuan tertentu dalam maksud pembuatannya, dapat dikatakan memperjuangkan hak suatu pihak. Film senyap disini ingin menyampaikan pesan mengenai bagaimana keluarga korban pembantaian peristiwa G30S 1965 menderita saat tahu keluarga mereka mati karena peristiwa pembantaian tersebut.

*"seperti yang saya bilang tadi, bahwa film itu bagian dari hegemoni. Hegemoni itu kan penggiringan opini untuk masyarakat itu menilai bahwa 'oh film ini benar apa salah' kalau memang film itu benar ya memang itu sejarah." (wawancara 24 September 2020)*

Situasi yang terjadi pada tahun 1965 bisa terjadi karena negara memiliki kekuatan dan wewenang dalam menentukan tindakan yang dianggap paling baik bagi negara. Kala itu komunis dianggap sebagai suatu ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Tindakan genosida yang dilakukan pada tahun 1965 hingga 1966 dapat dibenarkan, jika itu berpegang pada alasan demi keamanan dan kedaulatan negara. Tindakan ini belum bisa dibenarkan karena masih banyak rahasia mengenai peristiwa tersebut yang belum terungkap.

*"mencari kebenaran dibalik sebuah peristiwa itu haknya masyarakat untuk tahu, tetapi memang karena negara itu punya alat kekuasaan. Artinya dia bisa menekan siapapun yang dianggap melawan, itu sah karena memang negara diberikan keleluasaan untuk mengatur hajat hidup orang banyak." (wawancara 24 September 2020)*

Dalam adegan dimana Adi sedang duduk di kursi depan televisi dan melihat cuplikan video yang memberitakan kekalahan PKI. Adegan ini tidak disetujui informan R anggota organisasi GMNI yang menyangkan tindakan pembantaian tersebut.

*"Pada saat terjadi kekerasan pada saat itu memang menimbulkan tanda tanya besar. Peran negara ini dimana ketika terjadi hal-hal demikian. Karena versinya Senyap ini kan dia keluarga yang dibantai ini sesedih apa sih mereka. Kesalahan keluarga-keluarga mereka itu apa, apakah gara-gara PKI nya, apakah dia memang menganut komunisnya atau memang dia itu memang punya masalah dengan orang-orang dalam tanda kutip 'NU' ya karena memang yang mulai pertama kan NU." (wawancara 15 September 2020)*

Begitu juga informan I anggota organisasi PMII cabang Surabaya yang tidak membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan untuk memberantas PKI.

*"Benar NU terlibat, dalam artian terlibat sejarahnya. Kita juga pernah demonstrasi besar-besaran dalam menolak PKI, tapi bukan berarti disana kita mengalakan pembunuhan. PKI itu tidak bisa dibilang benar juga, karena elit-elit PKI itu sendiri yang bisa dibilang memiliki hasrat untuk menguasai negara, sehingga menghalalkan beberapa cara." (wawancara 22 Oktober 2020)*

Bila berpegang pada Hak Asasi Manusia, kejadian pada 30 September 1965 menjadi salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah dilakukan negara Indonesia (Kholis, 2012). Banyak organisasi-organisasi HAM yang masih memperjuangkan hak para korban peristiwa tersebut. Seperti Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 yang dianggap memiliki peran dalam memberi wadah bagi para korban untuk mengutarakan aspirasinya oleh The Truth Foundation yang berbasis di Korea Selatan (BBC, 2017). Pernyataan dari salah satu korban peristiwa ini tidak bisa menjadi perwakilan dari populasi keseluruhan para korban, namun dengan adanya film ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat atas kebenaran sejarah peristiwa tahun 1965/1966.

Informan M, anggota organisasi KAMMI menganggap film senyap merupakan bentuk framing atas kekecewaan keluarga korban. Dimana mereka berpendapat bahwa korban ini adalah orang yang sangat baik, tapi mengapa bisa mengalami kejadian seperti itu. Sepeti yang ditunjukkan dalam adegan Mamak dan Adi sedang bercerita bagaimana Ayah Adi begitu terpukul atas kepergian Ramli.

*"Malah berdasarkan film itu hanya satu keluarga saja yang diwawancarai. Apakah satu itu mewakili populasi? Kan gak gitu. Hanya main gimmick sebenarnya....terkait pesan yang disampaikan oleh film itu, saya mau menolaknya tidak memiliki data yang konkrit."*

Ada dua kemungkinan yang menjadi alasan terjadinya peristiwa G30S 1965, yakni rencana tersembunyi untuk pemenangan Soeharto atau memang benar PKI ingin menguasai negara dan mengubah ideologi negara. Tentunya kedua alasan ini tidak dapat dibenarkan caranya. Dalam dokumen rahasia Amerika Serikat yang dipublikasi oleh *National Declassification Center (NDC)* yang merupakan sebuah divisi dari *US National Archives and Records Administration (NARA)* menyebutkan ada ribuan orang yang terbunuh oleh militer, grup yang bersifat kemiliteran, dan milisi muslim yang mencurigai anggota PKI, dan etnis China serta pedagang anggota serikat dagang, guru, aktivis dan seniman. Salah satu dokumen yang menunjukkan banyaknya terduga PKI yang dibunuh di Bali, kurang lebih ada 100,000 jiwa per tanggal 21 Desember 1965 (Simpson, 2017).

*"[Anti-PKI violence] have now resulted in an estimated 100,000 PKI deaths. A reliable Balinese source informed the Embassy that PKI deaths on the island of Bali now total about 10,000 and include the parents*



*and even distant relatives of crypto-Communist Governer Sutedja” (Cable marked ‘Secret’ from the Political Affairs Counselor at the US Embassy in Jakarta to Washington DC, December 21, 1965)*

Dari dokumen-dokumen rahasia Amerika Serikat itu menunjukkan bagaimana pemerintah dan anti-PKI terlalu ceroboh dalam menyikapi PKI. Baik dari dokumen maupun instruksi Kolonel Jenderal Soeharto kepada TNI untuk membantai PKI dan memperbolehkan kepada militer dan milisi lokal untuk membunuh siapapun yang mereka anggap komunis. Tentu instruksi ‘siapapun yang dicurigai’ sebagai komunis boleh untuk dibunuh adalah hal yang salah, inilah yang menyebabkan banyak masyarakat tak bersalah menjadi korban dalam peristiwa pembantaian ini.

Perlunya identifikasi dalam menentukan komunis atau tidak, itu akan mengurangi jumlah korban tidak bersalah. Meskipun dalam tindakan pemusnahan suatu golongan dalam kondisi mendesak pasti akan memakan banyak korban. Bagaimanapun juga pembantaian ini tidak dapat dibenarkan, karena selain telah melanggar HAM juga karena perlakuan yang diberikan kepada para korban jauh dari kata manusiawi.

Informan S, anggota GMKI Surabaya merasa ada yang tidak pas dengan adegan yang ditunjukkan dalam film senyap dimana pimpinan pasukan pembunuh tingkat desa, Amir Husain dan Inong yang bercerita bagaimana mereka dulu memperlakukan para korban sebelum dibunuh dan ditenggelamkan di sungai. Cara ini begitu kejam, hingga akan menyakiti keluarga korban yang akan melihatnya.

Lalu pada adegan saat Adi berkunjung ke rumah salah seorang penjagal saat peristiwa 1965. Disini ia bertemu dengan penjagal tersebut yang ditemani anaknya. Penjagal itu juga bercerita mengenai pengalamannya ketika menjadi ‘pemberantas’ PKI kala itu, ia juga mengatakan bahkan membawa penggalan kepala Wanita ke kedai kopi Cina, hanya untuk menakut-nakuti. Sang anak mengatakan ketika ia tahu bahwa ayahnya adalah seorang ‘pemberantas’ PKI, ia merasa bangga, karena ayahnya seorang pahlawan bangsa.

Ketika Adi mengatakan bahwa dia adik seorang korban pemberantasan PKI, saat itu pula sang anak meminta maaf. Ia merasa bersalah atas perbuatan ayahnya. Informan S kurang sepakat dengan adegan ini, karena disini mereka membuka luka lama seseorang. Pembunuhan massal kala itu memang tidak dapat dimaafkan, akan tetapi dengan mengungkit kejadian yang menyakitkan itu tidak hanya melukai keluarga korban, namun keluarga penjagal juga.

*“Meskipun kita punya dendam kepada keluarga pembantai atau pembantai, seharusnya tidak perlu diungkit lagi. Ia melibatkan ayah dan ibunya yang sudah tua di film itu. Seharusnya kalau orang tua sudah seusia itu, sebenarnya sudah jangan dimanfaatkan untuk film-film seperti ini. Masa-masa tua itu kan*

*masa-masa yang membutuhkan kebahagiaan.”*  
(wawancara 17 Oktober 2020)

Seperti yang dikatakan Stuart Hall posisi negosiasi merupakan posisi dimana khalayak tidak sepenuhnya setuju dengan pesan yang disampaikan oleh media. Ada beberapa poin yang ditekankan oleh informan terkait pesan yang ditolak dari film Senyap itu sendiri.

Pertama terkait diungkitnya kembali luka yang dialami keluarga korban pembantaian maupun keluarga penjagal. Sesuatu yang menyakitkan apabila diungkit kembali tentunya akan membuat pihak yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Tidak dipungkiri hal itu bisa terjadi kepada keluarga penjagal, meskipun luka yang membekas pada keluarga korban lebih sakit. Seperti yang diketahui, beberapa penjagal yang masih hidup kini sudah diusia yang lanjut, bahkan sudah kesulitan dalam berkomunikasi. Ini juga menyakitkan bagi beberapa pihak yang menonton karena diusia lanjutnya, ia masih harus dan terus menanggung akibat tindakannya dahulu.

Kedua tujuan dibalik pembuatan film Senyap yang dianggap terlalu jauh jarak dirilisnya film dengan peristiwa yang terjadi. Terakhir, terkait jumlah informan (keluarga korban) yang belum dapat dikatakan mewakili populasi.

Poin-poin seperti diatas akan sulit terhindarkan apabila berkaitan dengan pelurusan suatu permasalahan. Dimana perlu penjelasan dari kedua pihak yang bersangkutan. Film senyap juga ingin menunjukkan pendapat dari dua sisi yang saling berkaitan, meskipun lebih fokus kepada korban pembunuhan.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan pemaknaan atau tahap *decoding* mahasiswa anggota organisasi mahasiswa ekstra kampus terhadap film Senyap bahwa sebanyak dua informan berada pada posisi hegemoni-dominan dimana informan memiliki penerimaan yang sama dengan isi pesan dan menerima seluruh isi pesan yang disampaikan dalam film Senyap. Ini menunjukkan Joshua Oppenheimer sebagai produsen teks berhasil menghegemoni penonton dengan menampilkan citra positif dari komunisme serta menampilkan dampak yang berkepanjangan kepada keluarga korban pembantaian tragedi 1965. Kemudian lima informan lain berada pada posisi negosiasi. Hasil ini menunjukkan bahwa informan menyetujui isi pesan yang disampaikan, akan tetapi tidak seluruh pesannya diterima dengan baik, informan memiliki pemahaman lain terhadap pesan yang disampaikan.

Adapun hasil penerimaan pesan informan berbeda-beda berdasarkan dengan latar belakang organisasi masing-masing serta pengalaman dan literasi masing-masing informan. Para informan yang organisasinya berbasis agama Islam cenderung untuk mencari tahu lebih dalam

lagi terkait dengan fakta-fakta yang ada mengenai tragedi 1965. Kemudian untuk informan organisasi berbasis agama Kristen juga tidak menerima sepenuhnya pesan yang disampaikan dalam film Senyap, serta mencari literasi lebih banyak terkait dengan tragedi 1965. Informan yang organisasinya berbasis agama Katolik setuju sepenuhnya dengan pesan di film tersebut, selain memiliki pengalaman serupa ia juga menyetujui bahwa tragedi tersebut adalah kesalahan pemerintah. Untuk informan yang organisasinya berbasis nasionalis juga menerima seluruh pesan yang disampaikan karena mereka menganggap ideologi komunisme bukan sebuah kesalahan.

### Saran

Diharapkan dengan penelitian ini, pembuat film Senyap mampu menambahkan koresponden yang dapat memperkuat isi pesan dari film Senyap sendiri. Kemudian dengan ditunjukkannya bukti-bukti yang memperkuat pesan utama film Senyap, sehingga penonton dengan latar belakang organisasi yang berbeda-beda akan lebih dapat menerima pesan utama film ini sendiri. Peneliti juga berharap informan maupun penonton film Senyap menjadikan film ini sebagai literatur tambahan dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan isu Komunisme di Indonesia maupun peristiwa G30S 1965. Dengan adanya film ini diharapkan dapat mengungkap fakta dengan segala pertimbangan dari literatur lainnya. Serta bagi para informan maupun penonton film Senyap dengan latar belakang organisasi yang berbeda-beda tidak terkonfrontasi dengan adanya film ini. Melainkan menjadi masukan demi memperbaiki bangsa Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wahib, 2012. *Pergolakan Pemikiran Islam*, Jakarta: Democracy Project.

Denis McQuail, 2011. *Teori Komunikasi Massa* McQuail, Jakarta: Salemba Humanika.

Em Griffin, 2012. *A First Look At Communication Theory*, New York: McGraw Hill.

Garin Nugroho, Dyna Herlina S, 2015. *Krisis dan Paradoks Film Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas.

Rachmah Ida, 2014. *Studi Media dan Kajian Budaya*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Stuart Hall et all., 1992. *Budaya Media Bahasa*, Yogyakarta: Jalasutra.

TEMPO, 2015. *Musso: Si Merah di Simping Republik*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si., 2006. *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana.

Prof. Dr. Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interkatif dan konstruktif)*, Bandung: Alfabeta.

Agistian Fathurizki, Ruth Mei U. 2018. *Pornografi Dalam Film: Analisis Resepsi Film "Men, Women, & Children"*. Universitas Telkom.

Alvian Rizky A. 2015. *Menjadi Warga ASEAN: Anak Muda dan Politik Kewargaan di Asia Tenggara*. Vol 4, 1.

Bunga Trinata A. 2017. *Pemaknaan Audiens Terhadap Film Dokumenter "Dhira Narayana Of Lingkar Ganja Nusantara"*. S1 Skripsi. Universitas Diponegoro.

Bahrul Ulum. 2006. *Paradigma Keagamaan dan Politik Organisasi KAMMI Daerah Jambi*. Vol. 21, 1. Kontekstualita.

Eileen W. Tom, 2014. *Social Construct in Film Culture: The Effect of it on the Performing Arts, and the Destroyed Association of Signs to Enhance Meaning*. Tesis. Portland State University.

Marcho Rizky Rampengan, Lotje Kawet. 2016. *Analisa Budaya China Dalam Kepengurusan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Manado*. Vol 16, 1.

Nur, dkk. 2012. *Pernyataan KOMNAS HAM tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 196-1966*. KOMNAS HAM.

Ryter, L. (1998, Oktober). *Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men Of Suharto's Order?* Indonesia 66. 46-73.

Tomi Suro W. 2017. *Mahasiswa FISIPOL UGM dan Wacana Rekonsiliasi Dalam Film Dokumenter (Analisis Resepsi Audiens terhadap Film Senyap Karya Joshua Oppenheimer)*. Universitas Gajah Mada.

Wakhida Khikmawati. 2019. *Rekonsiliasi Kultural Eks-Partai Komunis Indonesia (PKI) Dengan Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 1965-2006 Di Temanggung*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171018101025-32-249164/dokumen-rahasia-as-ungkap-upaya-penggulingan-sukarno-dan-pki>

<https://nasional.tempo.co/amp/707196/g30s-1965-inggris-sudah-lama-ingin-singkirkan-soekarno?>

<https://tirto.id/inggris-juga-tunggangi-g30s-untuk-gulingkan-sukarno-cxlc>

<https://tirto.id/sejarah-lobi-elite-pemuda-pancasila-dari-era-sukarno-ke-jokowi-diug>

<https://www.nybooks.com/daily/2013/07/18/indonesias-happy-killers/>

<https://historia.id/amp/politik/articles/soeharto-meminta-bantuan-cia-vJdqa>

<https://www.rappler.com/indonesia/126891-pandji-gelar-tur-dunia-bertema-ham>



<https://tirto.id/ikhtiar-kebenaran-dan-rekonsiliasi-kasus-65-di-solo-dan-palu-dczY>

<https://tirto.id/bersih-diri-dan-bersih-lingkungan-gaya-orde-baru-cKdq>

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/09/140930\\_analisa\\_g30spki\\_tommccawley](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140930_analisa_g30spki_tommccawley)

<https://www.nu.or.id/post/read/67358/sejarah-lahirnya-pmii>

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-87-det-imm.html>

<https://tirto.id/sejarah-kotagede-gelap-terang-hubungan-pki-dan-muhammadiyah-dcg3>

<https://tirto.id/kami-ada-untuk-mengganyang-pki-cyZ2>

<https://gmni-hukumtrisakti.org/sejarah-gmni/>

<https://gmki.or.id/2018/05/10/tentang-gmki/>

<https://dppgmni.org/tentang-gmni/>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40492251>

<https://www.hrw.org/news/2017/10/18/indonesia-us-documents-released-1965-66-massacres>

<https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2017-10-17/indonesia-mass-murder-1965-us-embassy-files>

